

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(Studi Literatur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Skripsi
Program Studi Administrasi Publik



OLEH :

SAIPUL MUNAWIR

NIM: 2016210154

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2021**

ABSTRAK:

Dalam masalah pembangunan yang ada di Indonesia salah satu perbaikan penguatan daerah yang dilakukan oleh otoritas publik dalam upaya mengurangi kemiskinan dengan cara menganalisis atau mengukus seberapa efektifnya suatu pemberdayaan melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan seberapa efektifnya program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam suatu upaya meningkatkan suatu pembangunan ekonomi masyarakat Kota Batu. Metode yang penulis gunakan dalam suatu penelitian ini yaitu pendekatan kepustakaan (*library research*). Pemberdayaan UMKM di Kota Batu bisa disimpulkan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah Kota Batu. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui UMKM sangatlah berperan penting dan efektif dalam ekonomi teritorial, terutama dalam menciptakan peluang posisi dan dalam ekonomi lokal, terutama untuk penciptaan membuka pintu lapangan pekerjaan kerja.

Kata Kunci: Pembangunan, Pemberdayaan, UMKM.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disebuah negara berkembang salah satunya yang menjadi sebuah prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan suatu negara itu ialah pembangunan nasional, begitu juga yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Dikarenakan pembangunan nasional dikategorikan mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan suatu bangsa yang digerakan oleh masyarakatnya bersama pemerintah. Masyarakat sendiri menjadi suatu pelaku pertama dalam pembangunan itu, dan disertakan dengan pemerintahan memegang kewajiban untuk mengerahkan, membimbing, mengayomi, serta dapat menciptakan suasana iklim yang bisa dikategorikan menunjang masyarakatnya. Sebagai bangsa yang berkembang tentunya melakukan upaya untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia sendiri sedang melakukan upaya meningkatkan pembangunan ekonomi dan industri. Dalam menghadapi era globalisasi sekarang tentunya dengan mengandalkan tingkat kemajuan industrinya, yang menjadi sasaran utama terwujudnya struktur ekonomi yang merata serta seimbang, untuk tujuan membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur didasarkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Pemberdayaan dilakukan dalam bentuk upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan bagi masyarakatnya, serta guna untuk memandirikan masyarakat menjadi subjeknya dalam tindakan pemberdayaan yang pemerintah sendiri lakukan untuk membantu masyarakat miskin, dalam meningkatkan kehidupan mereka. Dalam tujuan itu untuk mencapainya perlu diciptakannya proses prosedur

pemberdayaan yang baik dan benar guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sebuah program pembangunan dilakukan dengan mengadakan atau membangun lapangan pekerjaan dan juga mengadakan sebuah bentuk pelatihan. Suatu program pemberdayaan yang dijalankan ini diperlukan pembinaan atau suatu bimbingan khusus oleh lembaga di dalam pemerintahan ataupun instansi tertentu tertuju kepada masyarakat untuk melakukan proses pengupayaan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya.

Pemberdayaan masyarakat bisa juga terbilang salah satu program didikan nonformal dalam meningkatkan sebuah kemampuan masyarakatnya agar dapat diharapkan lebih berkembang dalam meningkatkan keterampilan diri yang dimiliki. Pemberdayaan juga dilakukan dalam bentuk upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, kemandirian masyarakat miskin, mengangkat kedudukan derajat masyarakatnya yang rendah menjadi lebih baik. Pemberdayaan juga dilakukan masyarakat dan diikuti pemerintahnya, agar mencapai suatu tujuan tersebut, perlu adanya sebuah program pemberdayaan kepada masyarakat sehingga dapat mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan juga merupakan salah satu dari proses pengubahan situasi sosial bertujuan agar menuju suatu masyarakat yang maju dalam menciptakan hidup yang lebih baik serta sejahtera. Dilihat juga dari ciri-ciri proses pemberdayaan tersebut memfokuskan kepada suatu peran partisipasi oleh masyarakat dari sebuah perencanaan sampai tahapan pelaksanaan dan pemeliharaan. Pemerintah serta instansi yang bertugas di dalamnya mempunyai suatu fungsi sebagai fasilitator dan motivator untuk masyarakatnya dalam suatu

proses sebuah sasaran pemberdayaan tersebut. Agar terciptanya sebuah tujuan yang ingin dicapai melalui bidang usaha memberdayakan masyarakat, dalam suatu masyarakat bermandiri, ber swadaya, serta bisa berinovasi dan juga mempunyai pola pikiran yang cosmopolitan, (Suharto,2010:12).

Sebuah upaya progress pembangunan ekonomi nasionalis, jika diperhatikan sampai tahap ini struktur dari ekonomi Indonesia didorong oleh suatu pelaku usaha yang tergabung di suatu kelompok usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha berskala besar. Sebuah gerakan dari kelompok-kelompok tersebut sangatlah bernilai membangun tinggi dalam upaya perekonomian nasional pada saat ini. UMKM adalah salah satu pilar penting yang bisa dikategorikan dalam upaya perekonomian nasional yang tergolong berwawasan kemandirian dan juga perkembangannya mempunyai suatu potensi cukup besar berguna untuk meningkatkan upaya dari kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan suatu peran dari usaha besar, koperasi instansi, maupun terhadap BUMN.

Sebuah perkembangan kemajuan UMKM juga dilihat mempunyai potnsi yang cukup baik dalam halnya meningkatkan nilai kehidupan masyarakat luas. Suatu hal yang dimana juga ditunjukkan oleh keberadaan dari UMKM yang telah mmpu dalam mencontohkan sebuah perwujudan yata dalam sebuah kehidupan sosial serta perekonomiannya juga adalah suatu dari aspek besar dari rakyat Indonesia sendiri. Tujuan dari peran UMKM ditujukan dapat mengkontribusikan terhadap suatu produk negara , jumlah pembangunan usaha dan pengusahanya, serta mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Ditengah permasalahan sekarang pembangunan ekonomi yang ada, peran UMKM merupakan titik pilar sasaran perekonomian Indonesia dari segi kualitas yang ada belum bisa diimbangkan dengan kualitas memadai. Karena masalah itulah rendahnya terhadap produktivitas dan daya saing, dapat menimbulkan suatu kesenjangan yang signifikan terhadap UMKM dengan suatu usaha berskala besar lainnya. Meningkatkan produktivitas sangatlah penting diperlakukan berguna dapat mendorong meningkatkan sebuah daya saing bagi pelaku UMKM untuk bisa lebih bergerak berkompetensi baik dalam nilai persaingan global sekarang.

Indonesia sekarang memiliki 34 provinsi dengan pulau yang berbeda-beda dan suatu provinsi, kota atau suatu wilayah mempunyai pembangunan pemberdayaan masyarakatnya masing-masing tergantung kondisi suatu kota atau wilayah tersebut. Kebijakan pembangunan pemberdayaan tersebut perlu adanya dalam pembangunan kota atau suatu wilayah agar guna meningkatkan kemajuan suatu kota atau wilayah itu sendiri. Meningkatkan kualitas kota atau wilayah tentunya banyak cara seperti pembangunan pendidikan maupun pembangunan ekonomi tergantung kualitas wilayah kota tersebut. Salah satunya media pembangunan ekonomi melalui Usaha Kecil, Mikro dan Menengah media yang sampai sekarang bisa dibbilang cukup efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi wilayah atau daerah.

Upaya peningkatan kualitas ekonomi daerah atau suatu wilayah tentu penting adanya, lewat UMKM pemberdayaan ekonomi bisa dibbilang sangat efektif dalam kemajuan perekonomian daerah. Terbukti selain membantu ekonomi masyarakat dalam program UMKM juga menyerap tenaga kerja didalamnya. Tetapi

tidak semua wilayah daerah yang program UMKM begitu baik dikarenakan faktor wilayah tersebut tidak begitu strategis dalam tata letak untuk melakukan program UMKM tersebut.

Binaan terhadap pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan terhadap pemerintahnya dalam suatu upaya mengurangi tingkat kemiskinan yang ada melalui upaya Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM), dalam sebuah programnya diharapkan banyak berkontribusi dalam mengembangkan daerah-daerah dan wilayah hingga mampu meningkatkan kualitas usahanya dan juga dapat mampu meminimalisir tingkat angka pengangguran di tempat tersebut. Upaya ini juga tergolong mempunyai sebuah peran yang dominan dan strategis dalam pengupayaan penumbuhan perekonomian dan membangun peluang penyerapan tenaga kerja tinggi terhitung dalam efektifnya pertumbuhan serta pendistribusian hasil pembangunan yang ada. Dalam situasi pengkritisan perekonomian yang terjadi pada saat ini, dimana terlihatlah banyak perekonomian berskala besar yang paham situasi stagnasi bahkan terhenti aktivitasnya, hanyalah usaha yang dimiliki oleh UMKM lah yang mampu membuktikan tangguh dalam upaya menghadapi situasi kritis tersebut.

Usaha Mikro Kecil, Menengah juga merupakan suatu usaha yang mampu terhadap peranannya sebagai mendominasi alternative sebuah kegiatan usaha produksi barang dan jasa selain itu juga dilihat dapat menyerap banyak penyediaan kesempatan kerja. Dari itulah UMKM perlu diberlakukan pemberdayaan. Berdasarkan dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya peraturan tersebut Undang-Undang No 20 Tahun

2008 dan peraturan daerah provinsi Jawa Timur Tentang Pemberdayaan UMKM, maka disusunlah sebuah Kebijakan Pemberdayaan UMKM yang termaktub dalam RPJMD Kota Batu No 4 Tahun 2016 dengan arah kebijakan termuat dalam Peraturan Daerah (PERDA), pemberdayaan dan pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk mendorong pelaku Ekonomi Sektor Informal dan UMKM agar lebih produktif dan kompetitif.

Berdasarkan sebuah pernyataan-pernyataan diatas perlunya sinergis antara para pelaku UMKM dan juga pemerintah Kota Batu yang bertugas sekaligus berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pemberdayaan UMKM, Sehingga mampu meningkatkan kemampuan pelaku UMKM. Peran penting Pemerintah juga dapat terlibat dalam lima wujud utama, yaitu. (*Pertama,*) selaku stabilisator, peran pemerintah sebagai stabilisator sangat berpengaruh penting dan harus dimainkan secara efektif. (*Kedua,*) selaku innovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi segala suatu sumber dari hal-hal baru. (*Ketiga,*) selaku modernisator, pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakatnya ke arah kehidupan yang modern. (*Keempat,*) selaku pelapor, pemerintah juga harus menjadi suatu panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakatnya. (*Kelima,*) selaku pelaksana sendiri, pemerintah masih dituntut dalam suatu peranannya sebagai pelaksana dari tugas sendiri sebagian kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan.

Pergerakan pemberdayaan UMKM yang mendominasi di Kota Batu, sebagian besar bergerak di bidang fashion, kerajinan tangan, dan makanan seperti oleh-oleh khas Kota Batu, karena oleh-oleh, fashion, dan kerajinan tangan Kota Batu adalah salah satu gerakan UMKM, yang mendukung sektor pariwisata.

Sedangkan dilihat dari efektivitasnya perkembangan UMKM di Kota Batu, dari tahun ke tahun memperlihatkan jumlah UMKM yang cenderung meningkat dengan angka pertumbuhan yang selalu positif dan efektif sekali dalam pemberdayaan ekonomi Kota Batu. Hampir dari seluruh pelaku UMKM, yang tersebar di seluruh Kota Batu didominasi oleh pelaku ekonomi kreatif. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Kota Batu mempunyai 23.554 UKM pada tahun 2019, dan UMKM Kota Batu, mampu menyerap tenaga kerja sebesar 45.477 orang, jumlah ini mampu menyerap 21,35% penduduk Kota Batu, yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Kota Batu.

Muncullah ketertarikan untuk menganalisis efektivitas pembangunan ekonomi lewat UMKM melalui kekuatan dan peluang, yang digunakan oleh Pemerintah Kota Batu dan didukung oleh para pelaku UMKM Kota Batu, serta yang menjadikan faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas pemberdayaan UMKM yang terjadi di Kota Batu. oleh karena alasan tersebut, diambil judul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Melalui UMKM”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemberdayaan melalui suatu Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu?

2. Apa Saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui suatu Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang ada, dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan seberapa efektifnya program pelaksanaan pemberdayaan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat Kota Batu.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan suatu tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam serta menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang konsep pembangunan nasional terutama tentang masalah efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Batu.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan efektivitas suatu pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi lewat Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Huraerah. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Humaniora. Jakarta.
- Chatarina, Rusmiyati. 2011. *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah*. B2P3KS. Yogyakarta.
- Creswell, J, W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung
- Eka Sari A. M. 2018. Efektivitas Program Pemberdayaan UKM Melalui Renstra (2011-2016) di Pesrindagkop dan UMKM Kota Bontang. *Administrasi Keuangan*. Universitas Mulawarman. Samarinda Kalimantan Timur.
- Ina, Primiana. 2017. *UKM dan Industri: Menggerakkan Sektor Rill*. Alfabeta. Bandung.
- Ikhsan. 2017. Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur. *Administrasi Negara*. Universitas Mulawarman. Samarinda Kalimantan Timur.
- Kartiningrum Eka Diah. 2015. *Panduan Penyusunan Studi Literatur*. Politeknik Kesehatan Majapahit. Mojokerto.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja. Bandung.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Refika Aditama. Bandung.

- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2010. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Saputra. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Ciamis. Administrasi Negara.
- Totok dan Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Yulong, Li dan Caroline Hunter. 2015. Community involvement for sustainable heritage tourism: a conceptual model. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*. Vol,5 Issue: 3. pp,248-262.
- Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Sumber Lain

Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang UMKM

Undang-Undang No.20 Pasal 6 Tahun 2008 tentang kreteria UMKM

Sumber Webshed

<https://batukota.go.id/>

https://ppid.batukota.go.id/ppid_pembantu/profil/dinas-koperasi-usaha-mikro-dan-perdagangan